



**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 62
TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA
PADA MASA PRESIDEN SUKARNO DENGAN
MASA PRESIDEN SOEHARTO**

SKRIPSI

Oleh

**Lukman Hakim
NIM 090210302091**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2014**



**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 62
TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA
PADA MASA PRESIDEN SUKARNO DENGAN
MASA PRESIDEN SOEHARTO**

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan
Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

Lukman Hakim
NIM 090210302091

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. ibunda tercinta Martiah, Ayahanda Nahrowi, yang senantiasa memberikan motivasi untuk menjadi dewasa dan lebih baik lagi dalam langkahku;
2. keluarga besar Ibunda dan Ayahanda di Wuluhan terima kasih atas dukungan dan do'a yang telah diberikan demi kesuksesan ananda;
3. semua guru mulai dari SD, SMP, SMA dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
4. almamaterku Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

MOTTO

Saya gandrung akan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, saya tidak mau mengenal istilah pembatasan asli dan tidak asli, persukuan, serta pemencilan-pemencilan yang berupa apapun dalam kesatuan tubuh bangsa Indonesia. *)

Etnis Tionghoa mempunyai akar sejarah lebih dari 500 tahun di bumi Nusantara, merupakan bagian tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. **)

*) Presiden Sukarno dalam Jahja, J. 1991. *Nonpri Di Mata Pribumi*. Jakarta : Yayasan Tunas Bangsa.

**) Setiono, B. G. 2008. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: TransMedia Pustaka.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Hakim

NIM : 0902010302091

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Perbandingan Implementasi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pada Masa Presiden Sukarno dengan Masa Presiden Soeharto” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 5 September 2014

Yang menyatakan,

Lukman Hakim

NIM 090210302091

SKRIPSI

**PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 62
TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA
PADA MASA PRESIDEN SUKARNO DENGAN
MASA PRESIDEN SOEHARTO**

Oleh

Lukman Hakim
NIM 090210302091

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Kayan Swastika, M. Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Sugiyanto, M. Hum

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Perbandingan Implementasi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pada Masa Presiden Sukarno Dengan Masa Presiden Soeharto” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember pada:

hari :

tanggal :

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Kayan Swastika M.Si
NIP 19670210 200212 1 002

Drs. Sugiyanto, M.Hum
NIP. 19570220 198503 1 003

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Sutjitro, M. Si
NIP. 19580624 198601 1 001

Drs. Sumarjono, M. Si
NIP. 19580823 198702 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jember,

Prof. Dr. Sunardi, M.Pd
NIP. 19540501 198303 1 005

RINGKASAN

Perbandingan Implementasi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pada Masa Presiden Sukarno dengan Masa Presiden Soeharto; Lukman Hakim; 090210302091; 2014: xiv dan 87 halaman; Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 merupakan sebuah kebijakan kewarganegaraan pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dengan tujuan agar warga negaranya memiliki satu kewarganegaraan saja, karena pada saat itu pemerintah RRC menggunakan *ius sanguinis* (keturunan), yang berarti semua orang Tionghoa adalah warga negaranya.

Implementasi Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 pada masa pemerintahan Presiden Sukarno, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1961 Tentang Pengawasan Orang Asing dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaraan yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Kependudukan Orang Asing.

Sedangkan implementasi Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu Intruksi Presiden No. 2 Tahun 1980 Tentang Bukti Kewarganegaraan RI dan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 Tentang Permohonan Pewarganegaraan RI. Persamaan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 pada masa Presiden Sukarno dengan masa Presiden Soeharto terletak pada kewajiban memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) bagi etnis Tionghoa. SBKRI adalah kartu identitas yang memberikan keterangan bahwa pemiliknya adalah warganegara RI, kebijakan negara cenderung mendiskriminasikan etnis Tionghoa yaitu melalui PP No. 10 Tahun 1959 yaitu sebuah kebijakan melarang etnis Tionghoa melakukan perdagangan di daerah pedesaan.

Sedangkan perbedaan terletak pada masa Presiden Sukarno menerapkan kebijakan integrasi (penyatuan), sedangkan pada masa Presiden Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi (pembauran).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah latar belakang lahirnya Undang-Undang No.62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan etnis Tionghoa, (2) Bagaimanakah implementasi Undang-Undang No.62 tahun 1958 pada masa pemerintahan Presiden Sukarno dengan masa Presiden Soeharto tahun 1959-1998, (3) Mengapa terjadi persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan Undang-Undang No.62 tahun 1958 pada masa pemerintahan Presiden Sukarno dengan masa Presiden Soeharto. Tujuan penelitian ini untuk : (1) menghayati secara mendalam latar belakang lahirnya Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan etnis Tionghoa, (2) menganalisis implementasi Undang-Undang No. 62 tahun 1958 pada masa pemerintahan Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto tahun 1959-1998, (3) menganalisis persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 pada masa pemerintahan Presiden Sukarno dengan masa Presiden Soeharto. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yaitu 1) Heuristik; 2) Kritik; 3) Interpretasi; 4) Historiografi.

Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 mencoba untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa dan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan agar mempermudah menyelesaikan masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa, hasilnya banyak etnis Tionghoa yang dapat memperoleh kewarganegaraannya dari kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut.

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan etnis Tionghoa pada awalnya prosesnya berlarut-larut dan memakan waktu yang lama, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Hal ini tidak menyurutkan etnis Tionghoa untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perbandingan Implementasi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pada Masa Presiden Sukarno dengan Masa Presiden Soeharto”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Sunardi, M.Pd, selaku Dekan FKIP Universitas Jember;
3. Drs. Pudjo Suharso, M.Si selaku ketua Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Dr. Nurul Umamah, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
5. Drs. Kayan Swastika, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Sugiyanto, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesainya penulisan skripsi ini;
6. Ibunda tercinta Martiah, Ayahanda Nahrowi, dan adikku Mufidatun Nisa yang senantiasa memberikan motivasi untuk aku menjadi dewasa dan lebih baik lagi dalam langkahku;
7. Wahyu Hari, Iim, Diana, Hafid, Ike, Mala, Hima, Eka, Betha, Wen, Anggik dan teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah angkatan 2009 terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dalam menuntut ilmu di Universitas Jember, semoga kita menjadi orang sukses;

8. Mas Yopi, Mas Wahyu, Warid, Yusuf dan Umam terima kasih telah menjadi sahabat yang baik selama ini, semoga kita menjadi orang yang sukses.

Besar harapan penulis bila segenap pembaca memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.

Jember, 5 September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Pengertian Judul	4
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.4 Rumusan Masalah	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Manfaat Penelitian.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB 3. METODE PENELITIAN	13
BAB 4. LATAR BELAKANG LAHIRNYA UU KEWARGANEGARAN NO.62 TAHUN 1958	17
4.1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1946.....	18
4.2 Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara (PPPWN).....	19
4.3 Undang-Undang No. 2 Tahun 1958 Tentang Perjanjian Dwi	

Kewarganegaraan antara RI dan RRC	21
BAB 5. IMPLEMENTASI UU KEWARGANEGARAAN NO. 62 TAHUN 1958 MASA PRESIDEN SUKARNO DENGAN PRESIDEN SOEHARTO	24
5.1 Masa Presiden Sukarno.....	26
5.2 Masa Presiden Soeharto.....	29
BAB 6. PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DALAM IMPLEMENTASI UU NO. 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA MASA PRESIDEN SUKARNO DENGAN PRESIDEN SOEHARTO	33
6.1 Persamaan Implementasi UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958 Masa Presiden Sukarno dengan Presiden Soeharto	32
6.2 Perbedaan Implementasi UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958 Masa Presiden Sukarno dengan Presiden Soeharto	36
6.3 Dampak Implementasi UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958 Masa Presiden Sukarno dengan Presiden Soeharto	38
BAB 7. PENUTUP.....	54
8.1 Kesimpulan	54
8.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR SINGKATAN

Baperki	= Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
BP KNIP	= Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
DKOA	= Dokumen Kependudukan dan Orang Asing
KMB	= Konferensi Meja Bundar
LPKB	= Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
WNI	= Warga Negara Indonesia
PPPWN	= Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara
RI	= Republik Indonesia
RRC	= Republik Rakyat Cina
RUU	= Rancangan Undang-Undang
SBKRI	= Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia
UUD	= Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Matrik Penelitian.....	60
Lampiran B : UU No. 62 Tahun 1958.....	61
Lampiran C : PP No. 67 Tahun 1958	71
Lampiran D : PP No. 10 Tahun 1959.....	74
Lampiran E :UU Kependudukan Orang Asing.....	79
Lampiran F : Inpres No. 2 Tahun 1980.....	82
Lampiran H : Keppres No. 13 Tahun 1980.....	84